

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Peranan pertanian antara lain adalah : (1) sektor pertanian masih menyumbang sekitar 23,3 % dari Produk Domestik Bruto (PDB), (2) sektor pertanian masih mampu menyediakan sekitar 54 % dari angkatan kerja yang ada, dan bahkan di propinsi tertentu kontribusinya melebihi angka tersebut, (3) sektor pertanian mampu menyediakan menu pangan dan karenanya sektor pertanian sangat mempengaruhi konsumsi dan gizi masyarakat, (4) sektor pertanian mampu mendukung sektor industri, baik industri hulu maupun hilir, (5) ekspor hasil pertanian yang semakin meningkat menyumbang devisa yang semakin besar (Soekartawi, 2006).

Perkebunan merupakan subsektor yang berperan penting dalam perekonomian nasional melalui kontribusi dalam pendapatan nasional, penyediaan lapangan kerja, penerimaan ekspor, dan penerimaan pajak. Dalam perkembangannya, subsektor ini tidak terlepas dari berbagai dinamika lingkungan nasional dan global. Perubahan strategis nasional dan global tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan perkebunan harus mengikuti dinamika lingkungan perkebunan. Pembangunan perkebunan harus mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi perkebunan selain mampu menjawab tantangan-tantangan globalisasi.

Pengembangan subsektor perkebunan sangat ditentukan oleh peran pemerintah, swasta, petani pekebun. Pemerintah dalam hal ini Departemen Pertanian telah memberikan tugas ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, khususnya Direktorat Perluasan Areal dalam penyiapan infrastruktur, salah satunya berupa kegiatan perluasan areal perkebunan dengan sasaran utama adalah dalam pengembangan perkebunan rakyat secara terbatas. Kegiatan ini telah dimulai sejak tahun 2006 dan dialokasikan diseluruh propinsi di Indonesia, dengan komoditi yang dikembangkan disesuaikan dengan kondisi agroklimat setempat (Departemen Pertanian, 2009).

Pendekatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan areal kawasan perkebunan, hendaknya dilaksanakan secara menyeluruh dari semua aspek teknis, sosial, ekonomis dan lingkungan, melalui tahapan yang jelas mulai dari penentuan calon lokasi dan calon petani melalui Survei Investigasi Desain (SID), penyiapan bahan tanam, termasuk pengembangan infrastruktur seperti jalan dan jembatan dari dan ke lokasi yang akan dikembangkan (Departemen Pertanian, 2009).

Komoditas perkebunan sampai saat ini masih berperan sebagai andalan penghasil devisa non migas dari sektor pertanian. Produk yang diekspor sudah sangat bervariasi, mulai dari jenis asalan sampai kepada komoditas telah mengalami berbagai tingkat pengolahan. Kakao (*Theobroma cacao* L) merupakan salah satu komoditi perkebunan Indonesia yang menjadi penyumbang devisa ketiga terbesar setelah minyak sawit sebesar US\$ 4,3 milyar dan karet sebesar US\$ 2,2 milyar, yaitu US\$ 488 juta pada tahun 2005 (Ditjen Perkebunan, 2006).

Kakao merupakan salah satu komoditas ekspor yang mampu memberikan kontribusi di dalam upaya peningkatan devisa Indonesia. Komoditas Kakao menempati peringkat ke tiga ekspor sektor perkebunan dalam menyumbang devisa negara, setelah komoditas karet dan CPO. Pada 2006 ekspor Kakao mencapai US\$ 975 juta atau meningkat 24,2% dibanding tahun sebelumnya. Tanaman Kakao khususnya yang dikelola oleh petani (perkebunan rakyat) dapat dijumpai pada seluruh Provinsi Indonesia. Statistik perkebunan (Ditjenbun, 2006) menunjukkan bahwa areal total perkebunan rakyat di Indonesia tercatat seluas 801.332 hektar dengan total produksi 512.251 ton per tahun (produktivitas 963,33 kg/ha/tahun) dan jumlah petani sebanyak 910.835 kepala keluarga (rata-rata kepemilikan lahan sekitar 0,89 ha/KK).

Indonesia tercatat sebagai penghasil Kakao terbesar ketiga di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan dalam sistem agribisnis dan pengembangannya. Beberapa kelemahan tersebut antara lain : (1) kurangnya pemeliharaan tanaman; (2) kualitas dan kuantitas pasokan hasilnya tidak selalu dapat memenuhi permintaan pasar ekspor; (3) kurangnya peralatan penanganan pasca panen pada tingkat petani; (4) rendahnya intensitas harga untuk kualitas yang berbeda; (5) penjualan yang berdasarkan volume

mendorong petani untuk mencampur biji Kakao kualitas rendah dengan kualitas tinggi dan kotoran untuk meningkatkan volume sehingga harga jual rendah (Litbang Departemen Perindustrian Republik Indonesia, 2006).

Luas areal perkebunan Kakao Indonesia pada 2006 mencapai 1,19 juta hektar 92,8% diantaranya berupa perkebunan rakyat dengan rata-rata pertumbuhan lahan 7,4% per tahun dalam 4 tahun terakhir. Dari 1,19 juta luas lahan tersebut hanya 70% saja yang menghasilkan. Rendahnya luas tanaman yang menghasilkan (TM) disebabkan oleh banyaknya tanaman Kakao berusia diatas 25 tahun yang sangat tidak produktif. Namun demikian, pertumbuhan rata-rata luas tanaman yang menghasilkan (TM) selama 4 tahun terakhir lebih tinggi dari pertumbuhan luas lahan, yakni mencapai 8,6% per tahun. Prosentase tertinggi TM terhadap luas lahan dicapai oleh kebun negara yang mencapai 89,4%, sebaliknya kebun swasta dan kebun rakyat relatif rendah (Suryani dan Zulfebriansyah. 2007).

Kebijakan peningkatan produktifitas tanaman serta mutu Kakao dilakukan secara bertahap, baik yang dihasilkan oleh petani maupun perkebunan besar. Penerapan kebijakan peningkatan produktifitas tanaman serta mutu Kakao ditempuh antara lain melalui : (1) optimasi kegiatan penelitian, khususnya untuk memperoleh klon Kakao tahap PBK, baik melalui upaya eksplorasi tanaman Kakao yang diduga tahan PBK maupun rekayasa genetik, (2) gerakan pengendalian hama PBK secara serius yang didukung dengan sarana dan dana yang memadai, (3) peremajaan dan klonisasi tanaman Kakao terutama dengan menggunakan bibit unggul, (4) perbaikan mutu biji Kakao melalui upaya perbaikan pengelolaan kebun dan fermentasi, (5) penerapan secara ketat terhadap persyaratan mutu biji Kakao untuk ekspor dan revisi SNI, (6) peningkatan kemampuan dan pemberdayaan petani serta kelembagaan usaha (Departemen Perdagangan, 2006).

Pada tahun 2008 Pemerintah Pusat melalui program Gerakan Nasional Peningkatan Hasil dan Mutu Kakao (Gernas kakao) memberikan bantuan pada Propinsi Sumatera Barat seluas 5.400 ha yang terdiri dari kegiatan Peremajaan, Rehabilitasi dan Intensifikasi untuk 5 Kabupaten. (Ditjenbun, 2010). Pada tahun 2008 diidentifikasi bahwa sekitar 70.000 Ha kebun Kakao di sentra produksi Kakao, kondisi tanamannya sudah tua/rusak, tidak produktif dan terserang berat

hama dan penyakit sehingga perlu dilakukan peremajaan tanaman secara bertahap. Pada tahun 2009 melalui Gernas Kakao peremajaan tanaman seluas 20.000 Ha di 9 Provinsi pelaksana Gerakan.

Sesuai dengan kebijakan Gubernur Sumatera Barat, bahwa Propinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai sentra produksi Kakao untuk wilayah Indonesia Bagian Barat. Kebijakan tersebut tertuang dalam nota kesepakatan antara Menteri Pertanian dan Gubernur Sumatera Barat yang ditanda tangani pada waktu pencaangan Sumatera Barat sebagai Sentra Pengembangan Kakao dan Revitalisasi Perkebunan untuk Indonesia Wilayah Bagian Barat dan penanaman perdana oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2006 (Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, 2006). Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu kabupaten pelaksanaan Gernas Kakao sebagaimana yang tertera pada DIPA dan dalam pelaksanaannya mengacu pada dokumen POK Satuan Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Padang Pariaman (05) Tahun Anggaran 2011. (Ditjenbun Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011). Lampiran (1 dan 2)

Sebagai kompensasi bagi petani peserta, maka diberikan bantuan benih tanaman sela (semusim) untuk ditanam di areal Kakao yang diremajakan. Pada tahun 2010 kegiatan peremajaan kebun seluas 15.150 ha dilaksanakan di 12 provinsi pada 50 kabupaten dan pada tahun 2011 dilaksanakan di 24 provinsi pada 92 kabupaten seluas 49.500 ha.

1.2. Rumusan Masalah

Nagari III Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu Nagari yang mendapat perhatian dan bimbingan dari Dinas Pertanian, Subdinas Perkebunan dan Kehutanan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam program pengembangan tanaman kakao. Dalam upaya pengembangan kakao didaerah ini, pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan. Kebijakan tersebut diantaranya adalah (1) pemberian bibit gratis kepada petani; (2) pemberian upah kerja; (3) subsidi pupuk; (4) bantuan alat pengolahan kakao; (5) pelatihan teknik budidaya kakao; (6) peningkatan SDM kelompok tani (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Padang Pariaman, 2009).

Fokus utama pengembangan kakao di Nagari III Aur Malintang adalah peningkatan produktifitas tanaman dan mutu hasil kakao. Dinas Pertanian Padang Pariaman menunjuk kelompok Padang Lariang sebagai kelompok yang secara khusus mengembangkan tanaman kakao dalam bentuk tanaman kakao berbasis kepada kelompok tani. Dalam upaya peningkatan produksi, kendala yang dihadapi adalah serangan hama, bibit yang tidak tahan hama, dan tanaman yang sudah tua/rusak. Untuk mengatasi hal ini pihak pelaksana gerakan memberikan bibit gratis kepada petani yang merupakan bibit unggul serta pelatihan – pelatihan teknik budidaya dan peningkatan SDM kelompok tani.

Berdasarkan pra survey dan hasil wawancara awal di Kecamatan IV Koto Aur Malintang Dalam pelaksanaan program peserta Gernas kakao mendapatkan gerakan kegiatan yaitu :

1. Mengganti tanaman yang sudah tua
2. Memperbaiki tanaman yang rusak
3. Memperbaiki tanaman yang tidak produktif
4. Penanaman pohon pelindung
5. Pemberian bantuan berupa upah kerja pada petani
6. Pemberian bantuan pupuk pada petani
7. Pemberian bantuan bibit pada petani
8. Pemberian bantuan peralatan pada petani
9. Memberikan pelatihan pada petani (pemberdayaan petani)
10. Penyediaan tenaga pendamping untuk petani
11. Pengadaan fasilitas untuk pendamping maupun kelancaran peserta Gernas

Berdasarkan hal diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan program Gernas Kakao yang telah berjalan dan monitoringnya masih dilakukan sampai sekarang khususnya di Nagari III Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman, maka pertanyaan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan program Gernas Kakao di Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman?
2. Bagaimana tanggapan petani tentang pelaksanaan program Gernas Kakao di Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman?

Berdasarkan itu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Studi Tentang Pelaksanaan Program Gernas Kakao di Nagari III Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman”**.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan pelaksanaan Program Gernas Kakao di Nagari III Koto Aur Melintang Kec. IV Koto Aur Melintang Kabupaten Padang Pariaman.
2. Mengetahui tanggapan petani dalam pelaksanaan Program Gernas Kakao di Nagari III Koto Aur Melintang Kec. IV Koto Aur Melintang Kabupaten Padang Pariaman

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, serta memecahkan masalah yang ditemui dalam program pengembangan Kakao. Bagi petani diharapkan mampu memberikan informasi dalam usaha taninya mengenai kebijakan Kakao.